

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki beberapa daerah yang rawan akan dengan bencana yang di sebabkan oleh faktor alam (Banjir, Gempa Bumi, Gunung Meletus, Kekeringan, Trsunami, Angin Topan, dan Tanah Longsor), non alam (Gagal Tekhnologi, Epidemi), Bencana Sosial (Konflik antar kelompok atau antar komonitas masyarakat, maupun teror). Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB dari tahun 1815-2018 Bencana yang paling banyak adalah Bencana alam dengan rincian Banjir (9.224), Puting Beliung (6.355), Tanah Longsor (5.153), Kebakaran Hutan dan Lahan (973), Kekeringan (2000), Gempa Bumi (401). Berdasarkan Data tersebut itu berarti suatu peristiwa bencana alam yang paling banyak sering terjadi adalah Banjir di beberapa wilayah se-Indonesia

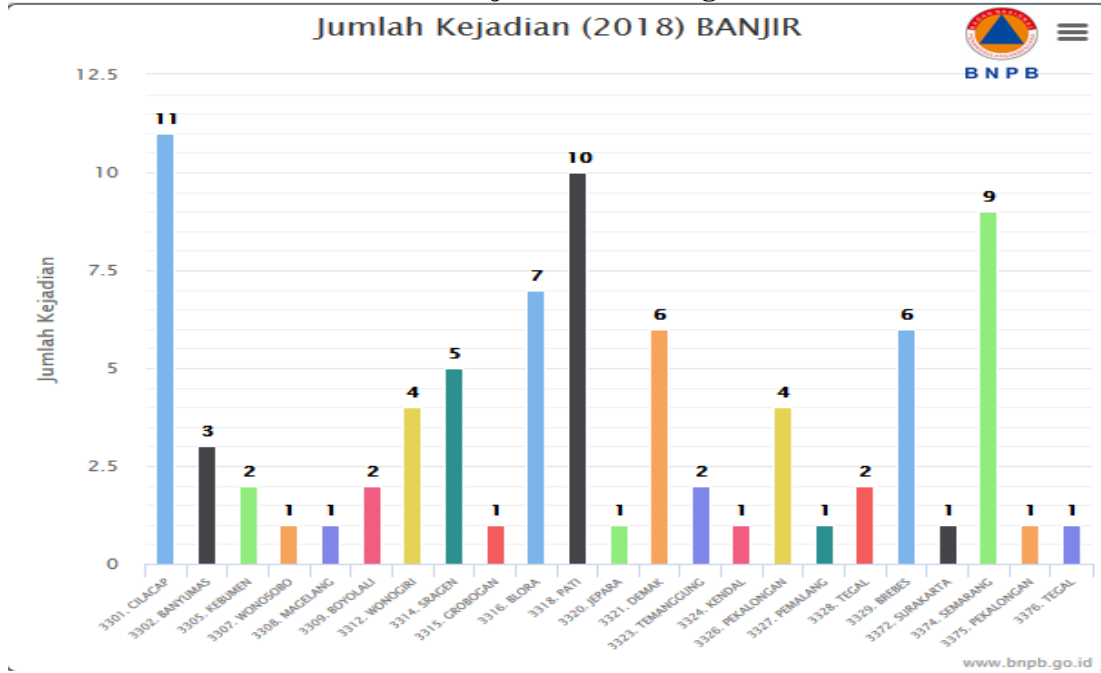
Bencana Banjir merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang terjadi karena melimpahnya genangan air di area tertentu akibat meluapnya aliran sungai atau danau atau laut yang menimbulkan baik kerugian secara materi, non-materi, bahkan menimbulkan korban jiwa (Adi, 2013). Banjir biasanya terjadi secara perlahan-lahan dalam kurun waktu yang lama maupun terjadi dalam kurun waktu yang singkat. Selain itu juga biasanya terjadi karena aliran sungai yang curam dan volume air yang tinggi serta aliran air yang deras dapat merusak sesuatu yang telah dilewati oleh bencana banjir. Secara umum dapat dipahami bahwa dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung yang ditimbulkan dari bencana banjir dapat diprediksi seperti merugikan secara materi maupun non-materil bahkan lingkungan yang terjadi karena banjir dengan contoh di Daerah pedesaan yang

memiliki mata pencarian sebagai petani harus menerima lahan mata pencarian petani terkena bencana banjir gagal panen.

Faktor-faktor penyebab banjir salah satunya adalah letak geografis termasuk wilayah dataran rendah sehingga rawan akan bencana banjir, hambatan yang terjadi di aliran sungai akibat kondisi geometri alur sungai yang mempertemukan sungai kecil, serta kemiringan aliran sungai yang terlalu landai sehingga terjadi menimbulkan Banjir. Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dari tahun 2017-2018 jumlah kejadian Bencana Banjir yang terjadi di Indonesia 3 (tiga) terbanyak pertama adalah Jawa Tengah memiliki 269 kejadian, kemudian yang kedua adalah Jawa Timur 214 kejadian, dan yang ketiga adalah Jawa Barat 144 kejadian. Hal ini berarti Jawa Tengah merupakan Wilayah yang yang paling banyak dalam Bencana Banjir dari tahun 2017-2018. Ini menandakan Jawa tengah merupakan wilayah yang sering terjadi bencana banjir terbanyak dari setiap tahunnya, bencana banjir merupakan sesuatu komponen yang fundamental untuk dicarikan solusi untuk mengatasi banjir yang tepat.

Jawa Tengah merupakan daerah yang sering terjadi bencana banjir dengan rincian menurut Data Informasi Bencana Indonesia pada tahun 2017 jumlah bencana banjir yaitu 190 kejadian, masyarakat yang terdampak bencana banjir dan mengungsi sebanyak 72,316 korban jiwa. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah bencana banjir yaitu 79 kejadian, masyarakat yang terdampak bencana banjir dan mengungsi sebanyak 250,960 korban jiwa. Berdasarkan data tersebut jumlah kejadian banjir yang tinggi pada tahun 2017, akan tetapi jumlah masyarakat yang terkena terdampak bencana banjir dan mengungsi yang tinggi pada tahun 2018. Titik fokus untuk menentukan dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir pada tahun 2018 karena dampak banjir lebih banyak dibandingkan tahun 2017 yang nantinya akan berdampak pada sektor Lingkungan, Perekonomian, maupun non perokonomian.

Gambar 1.1
Bencana Banjir di Jawa Tengah tahun 2018



Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2018

Sumber :

Jawa Tengah merupakan Wilayah yang rawan dengan bencana alam Banjir, tanah Longsor, dan Kekeringan. Akan tetapi Bencana Alam yang paling banyak adalah Bencana Banjir, Hal ini terjadi karena alam sudah tidak bisa menerima beban lingkungan serta keadaan cuaca yang ekstrim di beberapa daerah di Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2018 di atas Kabupaten yang paling banyak terkena Bencana Banjir yang sering terjadi adalah Kabupaten Cilacap dengan 11 Kejadian, yang kedua adalah Kabupaten Pati dengan 10 Kejadian, yang ketiga adalah Kabupaten Semarang dengan 9 Kejadian, keempat adalah Kabupaten Blora dengan 7 Kejadian, dan kelima adalah Kabupaten Brebes dan Kabupaten Demak dengan 6 Kejadian, dan seterusnya. Diketahui bahwa dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir pada sektor Lingkungan, Perekonomian, maupun non-Perekonomian. Kabupaten Brebes merupakan Daerah yang terkena bencana Banjir dan memiliki dampak Lingkungan (Pertanian),

Perekonomian, maupun non Perekonomian karena meluapnya sungai pamali yang berada di jantung kota.

Kabupaten Brebes merupakan daerah yang sering terjadi bencana banjir. Akan tetapi bencana banjir yang terparah pada tahun 2017-2018. Menurut (Purbaya, 2017) bencana banjir di Kabupaten Brebes pada tahun 2017 terdapat 5 Desa yang terkena dampak dari bencana banjir yaitu Desa Wangandalem, Pulosari, Limbangan Kulon, Krasak, dan Terlangu. Sedangkan Menurut (Lukmansyah, 2018) bencana banjir di Kabupaten Brebes pada tahun 2018 yang terkena dampak banjir ada 5 Kecamatan yaitu Wanasari ada 6 Desa, Brebes 8 Desa, Losari 11 Desa, Cileduk 1 Desa, dan Tanjung 1 Desa. Bencana banjir di Kabupaten Brebes disebabkan karena curah hujan yang tinggi selama kurang lebih satu minggu tanpa henti serta kiriman air dari daerah Brebes Selatan (dataran tinggi) yang turun hingga sampai dengan sungai pamali

Pemerintah telah membuat Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes tahun 2010-2030 pada pasal 48 menjelaskan bahwa pelestarian dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan cara membuat tanggul atau embung, atau bendungan atau Kawasan serapan yang bertujuan untuk pengendalian wilayah yang terkena banjir. Pengendalian wilayah tersebut yang menjadikan Pemerintah Daerah memberikan antisipasi bencana tersebut dengan menyiapkan dana bantuan bencana banjir dengan dana lima milyar pasca bencana di Kabupaten Brebes untuk Rehabilitasi dan Rekontruksi dalam sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif. Dalam mengelola bencana banjir di Kabupaten Brebes adalah Dinas PSDAPR Kabupaten Brebes telah membuat bangunan penahan air dan tanggul sepanjang 100 meter pada bulan April hingga Desember tahun 2017 untuk menahan volume air supaya tidak meluap ke wilayah sekitar sungai pamali, tetapi pada tahun 2018 bangunan tanggul

gebol karena tidak bisa menahan volume air yang tinggi, serta tingginya curah hujan di daerah Kabupaten Brebes. (Priyanto, 2018)

Dampak yang telah ditimbulkan dari bencana banjir bukan saja dari aspek geografis saja, akan tetapi masih banyak aspek yang ditimbulkan dari dampak banjir seperti aspek sosial ekonomi. Aspek Sosial yang terena dampak dari bencana banjir seperti lumpuhnya aktifitas atau kegiatan bagi masyarakat di lokasi yang terkena bencana banjir yang akan menyebabkan kondisi perekonomian yang tidak stabil. mata pencarian mayoritas masyarakat di Kabupaten Brebes juga adalah menanam Bawang Merah akan tetapi bencana banjir yang ada mengakibatkan kegagalan panen, Penyebab kegagalan panen karena bencana banjir yang melewati di sektor pertanian yang akan mengakibatkan bawang merah akan membusuk. oleh karena itu perlu rencana yang strategis untuk menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Brebes. (Suripto, 2018)

Tabel 1.1
6 Wilayah di Jawa Tengah yang memiliki Jumlah Bencana Banjir yang sering terjadi pada sektor Pertanian Luas Panen, Produksi, Produktifitas Padi tahun 2014-2018

Kabupaten	Padi Sawah dan Padi Padang			Padi Sawah dan padi padang		
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktifitas (ku/ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktifitas (ku/ha)
	2014	2014	2014	2018	2018	2018
Brebes	97.841	561.621	57.40	91.049	477.089	52,40
Cilacap	124.033	572.374	54.21	122.201	777.353	63,61

Blora	74.936	388.726	51.87	100.089	582.006	57.73
Pati	89.208	484.465	54.31	92.061	547.281	59.45
Demak	91.848	544.087	59.24	133.058	689.863	61.02
Semarang	37.173	213.127	57.33	30.913	172.282	55.73

Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Data yang bersumber pada Badan Pusat Statistik Jawa Tengah di atas dengan melihat pada Luas Panen, Produksi, dan Produktifitas Padi di 6 (Enam) Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki tingkat Bencana Banjir tertinggi. Diketahui bahwa jumlah Luas Panen, Produksi, dan Produktifitas dari tahun 2014-2018 Kabupaten yang mengalami peningkatan Produksi dan Produktifitas adalah Cilacap, Blora, Pati, Demak. Sedangkan Kabupaten yang menurun angka Produksi dan Produktifitas adalah Brebes, dan Semarang, akan tetapi jumlah penurunan yang terbanyak adalah kabupaten Brebes. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari keenam Kabupaten yang ada di Jawa Tengah yang memiliki tingkat Bencana Banjir tertinggi yaitu dampak yang ditimbulkan dari Bencana Banjir di Sektor Pertanian adalah Kabupaten Brebes. Selain Berdampak pada sektor Pertanian menurut (Lestari, 2018) banjir di Kabupaten Brebes menyebabkan Petani Bawang Merah merugi lebih dari Rp. 55 Milyar, Petani sudah berupaya untuk menanggulangi bencana banjir dengan memompa air di lahan pertaniannya, namun usaha petani tidak membuahkan hasil karena volume air yang terlalu banyak dan terus meningkat. Ini menandakan bahwa Berita nantinya akan berdampak juga pada Sektor Perekonomian Masyarakat Kabupaten Brebes karena Komoditas utamanya adalah Bawang Merah, Padi, dll.

Tabel 1.2
5 (Lima) Wilayah di Jawa Tengah yang memiliki penduduk Termiskin pada tahun 2018

No	Wilayah Jateng	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) pada tahun 2018
1.	Kabupaten Banyumas	226.20
2.	Kabupaten Kebumen	208.70
3,	Kabupaten Brebes	309.20
4.	Kabupaten Purbalingga	144.20
5.	Kabupaten Cilacap	193.20

Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan Tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari lima Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki jumlah Penduduk termiskin yang terbanyak. posisi yang pertama adalah Kabupaten Brebes yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu 309.20 jiwa sedangkan posisi yang kedua adalah Kabupaten Banyumas dengan jumlah 226.20 jiwa, posisi yang ketiga adalah Kabupaten Cilacap dengan jumlah 238.30 jiwa, posisi yang keempat adalah Kabupaten Kebumen dengan jumlah 233.40 jiwa, dan yang kelima adalah Kabupaten Purbalingga 171.90 jiwa. Ini menandakan bahwa Kabupaten Brebes Memiliki Jumlah Penduduk miskin pada tahun 2018 dengan jumlah 309.20 jiwa yang membawa dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir di Kabupaten Berebes.

Penanggulangan Bencana banjir di Kabupaten Brebes dengan Mitigasi merupakan suatu komponen yang fundamental yang harus dilakukan untuk menanggulangi bencana banjir karena Kabupaten Brebes memiliki sungai yang berada di Jantung Kota yang nantinya akan berdampak pada sektor pertanian dan perekonomian. Menurut (Musdah & Husein, 2016) Mitigasi Bencana

sendiri dibagi menjadi dua yaitu Mitigasi Struktural yaitu penanggulangan bencana dengan adanya pembangunan fisik seperti pembangunan tanggul, Bendungan, dan lain-lain. Sedangkan Non-Struktural merupakan suatu kegiatan atau aktifitas yang berlandaskan pada non fisik seperti Sosialisasi tentang Kebencanaan, Penataan Kota, dan lain-lain. Berdasarkan dari pengertian Mitigasi Bencana Struktural dan Non-Struktural yang paling sesuai dengan Ilmu sosial adalah dengan menggunakan Mitigasi Non-struktural karena langsung berinteraksi dengan lingkungan sosial dan akan di kolaborasikan dengan Mitigasi Struktural. Akan tetapi dalam Mitigasi Struktural tidak bisa meneliti secara mendalam karena ada batasan-batasan di dalam suatu pendekatan ilmu sosial dan ilmu eksakta. Begitu pula di dalam Penelitian ini akan Memfokuskan pada Mitigasi Non-Struktural dengan Struktural dengan **KINERJA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG (PSDAPR) KABUPATEN BREBES DALAM MITIGASI BENCANA TAHUN 2017-2018.**

1.2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes dalam mitigasi bencana pada tahun 2017-2018 ?

1.3. Manfaat dan Tujuan Penelitian

1. Manfaat Penelitian

- a. Secara subyektif sebagai bahan penambah wawasan dan mampu berfikir secara Ilmiah, serta kemampuan untuk menuliskan karya ilmiah berdasarkan kajian teori-teori yang telah di dapat.

b. Secara praktis sebagai bahan masukan dan sumbangan bagi PSDAPR Kabupaten Brebes dalam perencanaan penegmbangan terkait mitigasi bencana.

2. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana peran PSDAPR Kabupaten Brebes dalam Mitigasi Bencana Banjir tahun 2017-2018.

b. Untuk mengetahui Hambatan-Hambatan PSDAPR Kabupaten Brebes dalam Mitigasi Bencana Banjir.

1.4. Studi Terdahulu

Dalam rangka untuk menghindari kesamaan dengan peneliti yang sebelumnya maka diperlukan kajian pustaka. fungsi dari kajian pustaka adalah untuk membedakan sebuah karya dan menghindari kesamaan dalam peneliti sebelumnya. dalam penelitian ini mengguakan sepuluh literature.

Pertama, penelitian tentang Analisis Mitigasi Nonstruktural Bencana Banjir Luapan Danau Tempe. Journal of Governance and Public Policy, di dalam penelitian ini menggunakan Mitigasi Non Struktural melalui penataan ruang Penataan Ruang dapat dipahami menjadi tiga tahap yaitu Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian. Ketiga tahap ini dapat dipahami mulai dari suatu perencanaan untuk menentukan struktur dan tujuan apa yang ingin dicapai, Selanjutnya Pemanfaatan digunakan untuk menyusun pelaksanaan program atau kegiatan serta pembiayaan yang akan digunakan. Kemudian yang terakhir adalah Pengendalian yang akan memberikan tujuan yang akan dicapai dari suatu proses pada suatu perencanaan. Bencana Banjir di Danau tempe disebabkan Karena sedimentasi yang rusak oleh Erosi, selain itu juga karna factor di Danau Tempe

masih banyak sampah serta eceng Gondok yang masih banyak terdapat di areal Danau Tempe. Argumentasi masyarakat di daerah Danau Tempe tersebut tidak mengeluhkan datangnya Bencana Banjir, akan tetapi masyarakat sekitar bersyukur dengan adanya Banjir membawa keberuntungan secara materil ataupun non materil untuk menambah penghasilannya dengan memanfaatkan penangkapan ikan di Danau Tempe, akan tetapi di dalam Areal luar Danau Tempe yang banyak bertani akan merasakan dampaknya seperti gagal panen. Sebaliknya jika memasuki musim kemarau masyarakat sekitar bercocok tanam dengan menanam Palawija, selain itu juga di area Danau Tempe tersebut terdapat Rumah Panggung yang berbahan kayu yang tentu saja membahayakan masyarakat bila Banjir akan datang. Oleh karena itu perlu Penataan Ruang yang digunakan untuk Menanggulangi Bencana Banjir.

Kedua, Penelitian ini berfokus pada Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak. Objek Penelitian ini diambil karena Kabupaten Lebak merupakan daerah yang paling banyak terkena atau sering terjadi peristiwa Banjir dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Provinsi Banten. Peristiwa Banjir di Kabupaten Lebak setiap tahunnya terus meningkat dan rentan terhadap bencana banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak merupakan komponen yang krusial untuk menanggulangi Bencana Banjir di Kabupaten Lebak karena sudah menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengatasi Bencana Banjir, Dampak yang ditimbulkan dari Bencana Banjir bias Materil (Hilangnya harta benda) dan non materil (Jatuhnya Korba Jiwa).

Ketiga penelitian tentang Analisis Kinerja BPBD dalam Penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang. Permasalahan dalam mengatasi bencana banjir pada BPBD Kota Semarang adalah sarana dan prasaran yang kurang memadai untuk aktifitas-aktifitas di dalam menyelesaikan

pekerjaan BPBD Kota Semarang, karena diketahui bahwa fungsi dari sarana dan prasarana untuk membantu aktifitas-aktifitas dan mobilitas BPBD jadi tanpa adanya sarana dan prasarana dari kegiatan untuk membantu aktifitas-aktifitas BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang. Selain itu juga masalah yang dihadapi yaitu Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten di dalam bidangnya dengan bukti bahwa di dalam proses pelayanan terdapat delapan orang yang berjaga, oleh karena itu kualitas pelayanan kurang efektif, efisien, serta kurang cepat tanggap Masalah sarana dan prasarana penunjang perlu diperhatikan karena akan berkaitan dengan aktivitas dan mobilitas kerja dari BPBD Kota Semarang. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir belum optimal dilakukan. Selain itu BPBD Kota Semarang kekurangan orang yang kompeten di bidangnya hal ini dikarenakan BPBD memberikan pelayanan 24 jam non stop kepada masyarakat, sedangkan pegawai yang jaga dibagi per shift menjadi 8 orang hal ini membuat pelayanan yang diberikan kurang efisien, kurang efektif, dan kurang cepat tanggap. Dalam upaya untuk menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang kurangnya partisipasi masyarakat dalam kelurahan siaga bencana, serta belum adanya Standart Operasional Pekerja (SOP) di dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang.

Keempat adalah penelitian tentang Identifikasi Daerah rawan rob untuk evaluasi tata ruang pemukiman di Kabupaten lebak. Permasalahan yang terjadi adalah banjir rob akibat tergenangnya suatu wilayah yang terkena air pasang dengan debit yang tinggi dan kembali surut pada debit air mengurang, bencana rob ini terjadi karena faktor ketinggian tanah, penurunan tanah, jarak dari pantai, dan jarak dari sungai. Identifikasi banjir rob ini menggunakan mitigasi bencana melalui Tata Ruang sehingga permasalahan banjir rob tersebut bisa di minimalisir dampak negative yang akan terjadi. Tujuan penelitian ini untuk memetakan daerah yang diidentifikasi sebagai rawan banjir

rob dan mengevaluasi daerah yang rawan akan banjir rob terhadap rencana tata ruang kawasan pemukiman di Kabupaten Demak.

Kelima adalah Efektifitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pengurangan resiko bencana bencana di Kota Baubau. Permasalahan yang sering terjadi Kota Baubau adalah bencana banjir, sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) merupakan suatu Organisasi yang berfungsi untuk menanggulangi bencana yang ada di daerah, akan tetapi fungsi tersebut kurang optimal di sebabkan karena koordinasi untuk penanggulangan bencana tidak berjalan dengan baik dengan stekholder. Metode Penelitian yang digunakan menggunakan Kualitatif deskriptif karena diyakini bahwa kebenarannya di lapangan, serta data-data yang telah di dapat di analisis untuk di tarik kesimpulan. Indikator yang digunakan Kinerja meliputi Produktifitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibility.

Keenam adalah penelitian Adaptasi Non-Struktural Penduduk Penghuni Pemukiman Padat terhadap Bencana Banjir : Study Kasus Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Bencana banjir yang ditimbulkan membawa kerugian mencakup dari berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, dan bangunan fisik. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat di kawasan pemukiman padat di kecamatan Baleedah harus mempunyai upaya untuk mengurangi resiko bencana banjir dengan berfokus pada kesiapsiagaan masyarakat Baleedah dalam mengurangi resiko bencana banjir dengan pendekatan non-struktural. Upaya pengurangan Resiko bencana biasanya dilakukan dengan kebijakan struktural tanpa mempertimbangkan kondisi kesiapsiagaan masyarakat. Langkah yang dilakukan oleh masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana banjir dengan menyiapkan aksi dalam menghadapi banjir, melakukan pembagian tugas dalam anggota masyarakat, menyiapkan jalur evakuasi, dan menyiapkan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk gawat darurat.

Ketujuh adalah Penelitian Peran Pemerintah dalam mewujudkan tata ruang dalam wilayah yang berbasis mitigasi bencana di Kabupaten Cilacap. Bencana merupakan sesuatu peristiwa yang tidak bisa di prediksi namun upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana harus dilakukan untuk menanggulangnya seperti di peran pemerintah dalam tata ruang wilayah berbasis mitigasi bencana. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara pengumpulan data dilakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini bahwa peran pemerintah dilakukan dengan cara tata ruang berbasis mitigasi adalah dengan cara menata dan memperbaiki pola ruang, serta melakukan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kedelapan adalah Evaluasi Kebijakan Pola Ruang dan Struktur ruang berbasis bencana banjir study kasus kota Palu. Bencana banjir sering terjadi karena banyaknya sungai yang melewatinya, dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir di Kota Palu adalah jatuhnya korban jiwa yaitu 3 orang, dan 70 bangunan fisik rusak. Hal ini yang menjadi landasan untuk dilakukan penelitian.. Rencana pola ruang dan rencana struktur dilakukan untuk mengurangi resiko bencana banjir

Kesembilan adalah Penelitian tentang Efektifitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Bandar Lampung. Bencana yang terjadi di Kota Bandar Lampung adalah Banjir Bandang yang bertugas untuk menanggulangi bencana banjir di Kota Bandar Lampung adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Bencana banjir yang terjadi di Kota Bandar Lampung sering terjadi sejak 20 tahun terakhir, sehingga peran BPBD merupakan sesuatu hal yang penting keberadaanya untuk menanggulangi bencana. Akan tetapi dalam proses penanggulangan bencana di Kota Bandar Lampung ini masih belum optimal dikarenakan terdapat faktor penghambat di internal BPBD itu sendiri seperti minimnya sumber daya yang terlatih dan kurangnya sarana dan

prasarana. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti dengan melihat keadaan subyek maupun obyek penelitian berdasarkan fakta di lapangan.

Kesepuluh adalah penelitian tentang kota Semarang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi bencana yang tergolong tinggi. Dalam menanggulangi bencana yang terjadi BPBD di Kota Semarang yang bertugas mengatasinya. Akan tetapi kinerja masih bergejolak. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, serta teori yang digunakan untuk mengukur kinerja BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Semarang meliputi Produktifitas, Akuntabilitas, Responsivitas.

Berdasarkan uraian penjelasan sepuluh studi terdahulu diatas, peneliti akan mengklasifikasikan literature-literatur yang sudah di dapatkan dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah menemukan sesuatu perbedaan dan persamaan dari lieteratur-literatur yang berkaitan dengan peneliti. Bentuk tabel dibagi menjadi tiga indikator yaitu penulis, judul, serta ringkasan sebagai berikut :

No	Penulis	Judul	Ringkasan
1.	Musdah, E., & Husein, R. (2016).	Analisis Mitigasi Nonstruktural Bencana Banjir Luapan Danau Tempe. Journal of Governance and Public Policy, 1(3).	Mitigasi yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan Mitigasi NonStruktural Bencana Banjir Luapan Danau Tempe melalui penataan ruang. Indikator yang digunakan untuk Penataan Ruang

			terdapat tiga yaitu Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian.
2.	Musyadad, A., Handayani, R., & Haris, D. M. (2015).	Kinerja Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak	Kabupaten Lebak merupakan daerah yang paling banyak terkena atau sering terjadi peristiwa Banjir dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Provinsi Banten. Peristiwa Banjir di Kabupaten Lebak setiap tahunnya terus meningkat dan rentan terhadap bencana banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak merupakan komponen yang krusial untuk menanggulangi Bencana Banjir di Kabupaten Lebak karena sudah menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulanagan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengatasi Bencana Banjir.
3.	Syafril, S., & Sulandari, S. (2018).	Analisis Kinerja Badan Penanggulanagn Bencana (BPBD) dalam	Permasalahan dalam mengatasi bencana banjir pada BPBD Kota Semarang adalah sarana dan prasaran

		<p>Penanggulangan Bencana Banjir Kota Semarang. <i>Journal of Public Policy and Management Review</i>, 8(1), 65-81.</p>	<p>yang kurang memadai untuk aktifitas-aktifitas di dalam mnyelesaikan pekerjaan BPBD Kota Semarang, karena diketahui bahwa fungsi dari sarana dan prasarana untuk membantu aktifitas-aktifitas dan mobilitas BPBD jadi tanpa adanya sarana dan prasarana dari kegiatan untuk membantu aktifitas- aktifitas dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang.. Dalam upaya untuk menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang kurangnya partisipasi masyarakat dalam kelurahan siaga bncana, serta belum adanya Standart Operasional Pekerja (SOP) di dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang.</p>
4.	<p>Kusuma, A. C., Irwani, I., &</p>	<p>Identifikasi Daerah Rawan Rob Untuk Evaluasi Tata Ruang Pemukiman Di</p>	<p>banjir rob akibat tergenangnya suatu wilayah yang terkena air pasang dengan debit yang tinggi dan kembali surut pada debit air mengurang,</p>

	Widada, S. (2013).	Kabupaten Demak. <i>Journal of Marine Research</i> , 2(3), 1-5.	bencana rob ini terjadi karena faktor ketinggian tanah, penurunan tanah, jarak dari pantai, dan jarak dari sungai. Identifikasi banjir rob ini menggunakan mitigasi bencana melalui Tata Ruang sehingga permasalahan banjir rob tersebut bisa di minimalisir dampak negative yang akan terjadi.
5.	Sadat, A. (2016).	Efektifitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pengurangan resiko bencana bencana di Kota Baubau <i>JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah</i> , 1(1), 1-20.	Permasalahan yang sering terjadi Kota Baubau adalah bencana banjir, sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) merupakan suatu Organisasi yang berfungsi untuk menanggulangi bencana yang ada di daerah, akan tetapi fungsi tersebut kurang optimal di sebabkan karena koordinasi untuk penanggulangan bencana tidak berjalan dengan baik dengan stekholder. Metode Penelitian yang digunakan menggunakan Kualitatif deskriptif karena diyakini bahwa

			<p>kebenarannya di lapangan, serta data-data yang telah di dapat di analisis untuk di tarik kesimpulan. Indikator yang digunakan Kinerja meliputi Produktifitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibility.</p>
6.	<p>Sagala, S. & Wimbardana , R. (2014)</p>	<p>Adaptasi Non Struktural Penduduk Penghuni Pemukiman Padan Terhadap Bencana Banjir: Studi Kasus Kecamatan Baleendah Kabupaten Bendung. Relience Development Initiative (No. 5). Working Paper Series</p>	<p>Bencana banjir yang ditimbulkan membawa kerugian mencakup dari berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, dan bangunan fisik. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat di kawasan pemukiman padat di kecamatan Baleedah harus mempunyai upaya untuk mengurangi resiko bencana banjir dengan berfokus pada kesiapsiagaan masyarakat Baleedah dalam mengurangi resiko bencana banjir dengan pendekatan non-struktural. Upaya pengurangan Resiko bencana biasanya dilakukan dengan kebijakan structural tanpa mempertimbangkan kondisi kesiapsiagaan masyarakat.</p>

			Langkah yang dilakukan oleh masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana banjir dengan menyiapkan aksi dalam menghadapi banjir, melakukan pembagian tugas dalam anggota masyarakat, menyiapkan jalur evakuasi, dan menyiapkan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk gawat darurat.
7.	Canesty, F. F. (2017).	Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Tata Ruang Wilayah yang berbasis mitigasi bencana di Kabupaten Cilacap. (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).	Bencana merupakan sesuatu peristiwa yang tidak bisa di prediksi namun upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana harus dilakukan untuk menanggulangnya seperti di peran pemerintah dalam tata ruang wilayah berbasis mitigasi bencana. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara pengumpulan data dilakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini bahwa peran pemerintah dilakukan dengan cara tata ruang berbasis

			mitigasi adalah dengan cara menata dan memperbaiki pola ruang, serta melakukan pengendalian pemanfaatan ruang.
8.	Rachmatullah, M., Rogi, O. H., & Tilaar, S. (2016).	Evaluasi Kebijakan Pola Ruang Dan Struktur Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Banjir (Studi Kasus: Kota Palu). <i>SPASIAL</i> , 3(3), 97-105.	Bencana banjir sering terjadi karena banyaknya sungai yang melewatinya, dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir di Kota Palu adalah jatuhnya korban jiwa yaitu 3 orang, dan 70 bangunan fisik rusak. Hal ini yang menjadi landasan untuk dilakukan penelitian.. Rencana pola ruang dan rencana struktur dilakukan untuk mengurangi resiko bencana banjir
9.	Rakasiwi, E. S. (2018)..	Efektifitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Bandar Lampung	Bencana yang terjadi di Kota Bandar Lampung adalah Banjir Bandang yang yang bertugas untuk menanggulangi bencana banjir di Kota Bandar Lampung adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Bencana banjir yang terjadi

			<p>di Kota Bandar Lampung sering terjadi sejak 20 tahun terakhir, sehingga peran BPBD merupakan sesuatu hal yang penting keberadaanya untuk menanggulangi bencana. Akan tetapi dalam proses penanggulangan bencana di Kota Bandar Lampung ini masih belum optimal dikarenakan terdapat faktor penghambat di internal BPBD itu sendiri seperti minimnya sumber daya yang terlatih dan kurangnya sarana dan prasarana. Dalam peneltian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti dengan melihat keadaan subyek maupun obyek penelitian berdasarkan fakta di lapangan.</p>
10.	Indriyan, I., & Hariani, D. (2014).	Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota	kota semarang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi bencana yang tergolong tinggi.

		Semarang. <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , 4(4), 102-112.	Dalam menanggulangi bencana yang terjadi BPBD) di Kota Semarang yang bertugas untuk mengatasinya. Akan tetapi kinerja masih bergejolak. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, serta teori yang digunakan untuk mengukur kinerja BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Semarang meliputi Produktifitas, Akuntabilitas, Responsivitas.
--	--	--	--

1.5. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel-variabel pokok masalah yang ada pada penelitian.

1.5.1. Kinerja

1.5.1.1 Pengertian Kinerja

Secara Etimologis, Kinerja adalah suku kata yang berasal dari “Kerja” yang diartikan sebagai prestasi yang telah dicapai. bisa pula diartikan sebagai hasil kerja yang telah dicapai.

sedangkan pengertian “kinerja” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kemampuan sesuatu hasil yang dicapai. Sedangkan menurut Withmore dalam (Sinambela, et al., 2006) mengemukakan bahwa Kinerja merupakan suatu expresi yang dimiliki oleh setiap Individu untuk untuk memenuhi tanggung jawab sesuai dengan standart yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut (Rai, 2014) Kinerja adalah sesuatu kegiatan atau program yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan dari masing-masing Instansi Pemerintah yang sudah di sepakati dan sesuai dengan target pencapaiannya. Integritas merupakan sesuatu modal untuk tercapainya sesuatu kegiatan atau program untuk mencapai tujuan dari masing-masing Instansi Pemerintah, karena bila seseorang mempunyai orientasi untuk memberikan sesuatu hal dengan cara baik maka akan mewujudkan hasil yang baik.

1.5.1.2. Jenis-Jenis Kinerja

1. Kinerja Individu

Menurut Donelly, Gibson, and Invacechevich dalam (Sjari, 2009) Kinerja Individu dapat diukur menggunakan : Kemampuan, Keinginan, dan Lingkungan. Dapat dipahami bahwa Kinerja Individu dapat berpengaruh pada kemampuan yang dimiliki pada setiap individu, dan keinginan atau integritas dari setiap individu untuk mecapai tujuan, serta Lingkungan yang dapat mendukung untuk bisa lebih baik lagi.

2. Kinerja Organisasi

Menurut (Sinambela, 2007) Kinerja Organisasi adalah Upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi utuk mencapai sebuah tujuan, Misi dan Visi bagi Organisasi. Dalam melaksanakan pencapaian tujuan organisasi perlu adanya koordinasi pemimpin dan

pegawai Karena pemimpin melaksanakan tugasnya dibantu oleh pegawai yang nantinya akan membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi kinerja pegawai akan mempengaruhi kinerja pimpinan dan nantinya akan berpengaruh pada kinerja organisasi.

Penilaian Kinerja merupakan sesuatu hal yang penting karena sebagai tolak ukur keberhasilan di dalam instansi pemerintahan. di dalam penilaian Kinerja komponennya meliputi sebagai pelayan publik, jadi informasi mengenai seberapa jauh pemerintah melakukan pelayanan kepada masyarakat di Daerah-Daerah Indonesia (Mutiarin & Zaevudin, 2014)

1.5.1.3. Indikator Kinerja

Indikator-Indikator dalam Kinerja Pemerintah di tentukan dengan menggunakan Menurut Dwiyanto dalam (Dwiyanto, et al., 2012) memiliki Lima (5) Indikator untuk mengukur Kinerja, yaitu:

1. Produktivitas, merupakan dengan mengukur tingkat efisiensi, efektivitas pelayanan, dan tingkat pelayanan publik dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output.
2. Kualitas layanan, dengan mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
3. Responsitas, dengan mengukur kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

4. **Responsibilitas**, menjelaskan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.
5. **Akuntabilitas**, seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat atau ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki para stakeholder.

Dalam indikator kinerja organisasi menurut Dwiyanto terdapat lima indikator yaitu Produktifitas, Kualitas Pelayanan, Responsitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Akan tetapi di dalam penelitian ini menggunakan tiga indikator saja untuk mengukur kinerja organisasi yaitu Produktifitas, Responsitas, dan Akuntabilitas dikarenakan di dalam ketiga indikator tersebut sudah mewakili dari beberapa indikator yang banyak digunakan untuk mengukur kinerja organisasi.

Menurut Dwiyanto konsep Produktifitas membahas tentang efektif dan efisien, serta penyelenggaraan pelayanan publik untuk mencapai hasil yang telah diperoleh. Dengan demikian, produktifitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja di dalam kinerja organisasi. Dalam hal ini pengukuran kinerja dengan pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang Kabupaten Brebes dalam mitigasi bencana tahun 2017-2018. Sedangkan Responsitas merupakan indikator kinerja yang mengukur tingkat kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan. Secara langsung menggambarkan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dengan pelaksanaan program maupun kegiatan. Mengenai Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai suatu acuan pelayanan yang digunakan

oleh organisasi untuk merefleksikan pola pelayanan yang digunakan yang mengacu pada kepuasan publik sebagai pengguna jasa. (Hayati, 2012)

1.5.1.4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja

Kinerja memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja menurut (Mahmudi, 2010) meliputi :

1. Faktor Individu atau personal meliputi : pengetahuan, ketrampilan, optimis, motivasi, serta integritas dari setiap individu. Jadi ketika salah satu faktor tersebut telah hilang pada setiap individu maka akan dipastikan akan mengganggu kinerja pada individu. Cara yang dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan melakukan pelatihan, pembimbingan, dan pendidikan pada setiap individu. Selain itu cara lain yang dilakukan adalah dengan menggunakan bonus dalam kinerja sehingga dapat memicu setiap individu untuk memberikan yang terbaik, sehingga dapat mencapai tujuan bagi organisasi.
2. Faktor Kepemimpinan meliputi : memberikan motivasi, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan. Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan, visi, atau misi bagi organisasi bukan hanya individu saja yang terlibat meskipun di dalam organisasi setiap pegawai yang berpengaruh besar untuk memberikan kemajuan. Akan tetapi pemimpin memiliki sebuah peran juga untuk memberikan sebuah tujuan yang ingin dicapai. Selain itu juga pemimpin mampu mengkoordinasikan kepada pegawai seperti berinteraksi dengan pegawai yang meliputi sosialisasi, komunikasi, maupun sharing-sharing terkait dengan visi, misi, maupun tujuan bagi organisasi yang nantinya akan berkolaborasi untuk kepentingan organisasi.

3. Faktor kerja sama tim meliputi : memberikan semangat yang diberikan oleh rekan satu tim, kepercayaan kepada anggota tim, dan kekompakan. Dalam proses kerjasama tim merupakan suatu komponen yang penting untuk mencapai tujuan, visi, maupun visi yang ingin dicapai.
4. Faktor Sistem meliputi : sistem pekerjaan, sarana dan prasarana yang telah diberikan setiap organisasi, dan proses organisasi, serta kultur di dalam suatu organisasi. Sistem pada pekerjaan akan membuat organisasi agar lebih efisien dan efektif di dalam suatu kegiatan maupun program. Sedangkan untuk memberikan hasil yang efektif dan efisien di dalam tujuan, visi, dan misi organisasi menggunakan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktifitas organisasi. Tentunya penggunaan teknologi meliputi peralatan kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang akan dihasilkan oleh organisasi. Semakin berkualitas teknologi yang dimiliki oleh organisasi, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja organisasi. proses organisasi merupakan serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh setiap organisasi untuk mencapai tujuan, misi, maupun visinya. dalam proses organisasi terdapat kultur di dalam suatu organisasi yaitu pola kerja yang menjadi citra organisasi yang bersangkutan.
5. Faktor Kontekstual (Situasional) meliputi : tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal. Pengertian lingkungan eksternal meliputi faktor politik yang akan memberikan sesuatu peraturan untuk setiap organisasi yang bertujuan untuk memperbaiki sistem di dalam organisasi dan di dorong untuk memberikan inovasi bagi setiap organisasi. Kemudian faktor ekonomi yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat sehingga pendapatan masyarakat terus berkembang, dan faktor sosial

yang memberikan pandangan masyarakat terhadap kinerja setiap organisasi. Sedangkan Lingkungan internal meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia yang berkualitas.

1.5.1.5. Manfaat Kinerja

Manfaat Pengukuran Kinerja menurut Wayne C. Parker dalam (Sardjiato, 2000)

1. Pengukuran Kinerja dapat meningkatkan mutu di dalam suatu pengambilan keputusan (*Decision Making*)

Dalam Pengambilan sesuatu keputusan Pemerintah akan mendapatkan tekanan dari berbagai Orang atau kelompok yang memiliki kepentingan didalamnya, selain itu juga mendapatkan masukan dari partai politik sehingga rencana yang akan di jalankan akan mendapatkan beberapa dimensi untuk menjalankan program maupun kegiatan. Proses pengambilan keputusan ini atau (*Decision Making*) tentunya harus memperhitungkan manfaat serta dampak yang akan di timbulkan dari proses pengambilan keputusan ini, terlebih lagi mendapatkan tekanan dari luar yang ingin mendapatkan sesuatu hasil yang ingin dicapai sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pengukuran sesuatu kinerja dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ada dapat memberikan solusi di dalam proses pelaksanaan sesuatu program. Selain itu dapat mempermudah di dalam proses Monitoring dan Evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan.

2. Pengukuran Kinerja dapat meningkatkan Akuntabilitas di Internal

Pengukuran Kinerja ini secara akan secara otomatis mempertanggung- Jawabkan Akuntabilitas di dalam cakupan Pemerintah dari bawah sampai dengan atas

(Hubungan Vertikal) sehingga nantinya Akuntabilitas ini akan Bertanggungjawab sampai kepada pihak legislative untuk melakukan *check and balance* di dalam lingkungan pemerintah.

3. Pengukuran Kinerja dapat meningkatkan Akuntabilitas Publik

Maksud dari Akuntabilitas Publik adalah proses pertanggungjawaban segala hasil pencapaian kepada Pemerintah (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) dan masyarakat lainnya, sehingga dapat mengoreksi adanya program maupun kegiatan yang telah dicapai. Tentunya pemerintah harus siap untuk menerima kritik atau saran dari masyarakat bila terjadi sesuatu yang menyalahi aturan yang ada dan dapat memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Akuntabilitas publik memperhatikan publikasi laporan sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi tentang program atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan maupun yang sudah dilakukan. Dalam Proses Akuntabilitas perlu sekali keterlibatan masyarakat di dalam proses pengambilan Kebijakan untuk memberikan aspirasi-aspirasi masyarakat untuk di carikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada.

4. Pengukuran Kinerja mendukung Perencanaan Strategis dan penetapan tujuan

Perencanaan Strategis merupakan komponen yang terpenting untuk melihat kinerja yang ada, Karena di dalam perencanaan strategis terdapat menentukan sesuatu program maupun kegiatan, setelah itu mengidentifikasi sesuatu kebutuhan masyarakat untuk mencarikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang telah ada, dan yang terakhir adalah menentukan misi yang dilakukan untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Yang nantinya akan di tetapkanlah tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

5. Pengukuran Kinerja untuk menentukan penggunaan Sumber Daya secara efektif dan Efisien

Pengukuran ini untuk menentukan besaran kualitas dan kuantitas dari sumber daya yang akan di butuhkan untuk mencapai tujuan yang ada melalui program-program maupun kegiatan-kegiatan. Sumber daya ini dibagi menjadi 3 yaitu sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Oleh karena itu penentuan sumber daya sangat diperhitungkan untuk mencapai tujuan yang ada.

1.5.2. Mitigasi Bencana

1.5.2.1. Pengertian Mitigasi

Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 24 tahun 2007 menjelaskan bahwa pengertian mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi bencana baik disebabkan karena faktor alam, non alam, maupun sosial sehingga mengakibatkan hilangnya harta benda, korban jiwa, kerusakan lingkungan dan infrastruktur, dampak psikologis .

- **Bencana Alam**

Bencana alam adalah serangkaian peristiwa bencana yang diakibatkan karena faktor alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, longsor, kekeringan, banjir, angin topan, badai.

- Bencana Non Alam

Bencana Non alam adalah serangkaian peristiwa bencana yang diakibatkan karena faktor non alam seperti gagal teknologi, epidemi, dan wabah penyakit.

- Bencana Sosial

Bencana sosial adalah serangkaian peristiwa bencana yang diakibatkan karena manusia seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Mitigasi bencana erat kaitannya dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menanggulangi bencana karena pemerintah pusat maupun daerah mempunyai anggaran untuk mitigasi bencana yang digunakan untuk melindungi dan melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat serta merumuskan perencanaan pembangunan di daerah yang di sebabkan karena faktor bencana. Menurut (Nurjanah, Sugiharto, Kuswanda, BP, & Adikoesoemo, 2013) Penanggulangan Bencana dapat di klasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana. Akan tetapi didalam Mitigasi terdapat di Pra Bencana yang akan menjadikan langkah-langkah untuk menanggulangi Bencana :

1. Pada saat tidak terjadi bencana

- a) Penanggulangan tahap pertama : Penegalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan resiko, alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang telah ada.

- b) Pengurangan resiko bencana : pengenalan dan pemantauan resiko bencana, perencanaan partisipatif, penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar

bencana, penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

c) Pencegahan yang terdiri atas : identifikasi dan pengenalan secara pasti secara sumber bahaya atau ancaman bencana, kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang tiba-tiba menjadi sumber bencana, pemantauan dan menggunakan teknologi, tata ruang dan manajemen lingkungan, serta memberikan daya tahan sosial.

d) Pemanduan dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan cara mencamtumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan pusat dan daerah,dilakukan berkala dan dikoordinasikan oleh suatu badan.

e) Analisis Resiko Bencana merupakan untuk mengantisipasi terjadinya bencana dengan normal,waspada, siaga, dan awas.

f) Melaksanakan dan menegakan perencanaan tata ruang untuk mengurangi resiko bencana dengan cakupan pemberlakuan peraturan tentang tata ruang, standart keselamatan, dan penerapan sangksi-sangksi terhadap pelanggar.

g) Pendidikan dan pelatihan.

h) Persyarakat standar tekhnis penanggulangan bencana.

1.5.2.1. Mitigasi Bencana Banjir Melalui Penataan Ruang

Mitigasi Bencana merupakan sesuatu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi bencana banjir yang akan memungkinkan akan terjadi. Dalam Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada pasal 47 dijelaskan bahwa untuk menanggulangi bencana dengan menggunakan mitigasi untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada di

kawasan rawan melalui kegiatan-kegiatan seperti penataan ruang, Pengaturan Pembangunan, Pembangunan Infrastruktur, tata bangunan, penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan. Selain itu penanggulangan bencana dilakukan dari sektor penataan ruang dengan melihat Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang membahas tentang perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan Penataan Ruang untuk mengatasi bencana merupakan komponen yang penting dalam kegiatan mitigasi bencana. Identifikasi dalam proses perencanaan penataan ruang untuk meletakkan kawasan yang rawan dengan bencana menurut Dradak dalam (Muta'ali, 2014) meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi pada proses:

A. Perencanaan penataan ruang

1. Pendekatan kesatuan unit eco-Regional di dalam perencanaan kawasan yang rawan akan bencana dengan memperhitungkan aspek dari system interaksi antara Ekosistem, Sumber Daya, dan tatanan budaya yang ada di daerah sekitar lokasi suatu objek.
2. Memperhitungkan aspek Lingkungan untuk menentukan alokasi pemanfaatan sumber daya, sehingga dapat mengurangi dampak negative yang akan di timbulkan dari lingkungan.
3. Memperhitungkan aspek dari kemampuan sumber daya lingkungan. Jadi menentukan rencana kawasan yang rawan dengan bencana dengan daya dukung seperti sumber daya, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Kemudian daya tampung memperhitungkan neraca lingkungan yang akan membuat dampak negative seperti aktifitas-aktifitas manusia yang dapat merusak lingkungan atau menghambat lingkungan.
4. Menentukan Alokasi ruang yang sesuai dengan kegiatan atau karakteristik ruang atau lokasi. Kawasan yang rawan akan dengan bencana merupakan daerah lindung. Daerah lindung dapat diartikan sebagai daerah yang dilindungi dengan cara fisik untuk melindungi

daerah-daerah yang lainnya. Sebaliknya aktifitas-aktifitas sosial di pindahkan dari daerah yang aman dari kawasan yang rawan dengan bencana.

5. Penyusunan Progran atau kegiatan yang detail. Penyusunan Program atau kegiatan bertujuan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan akan bencana secara detail, selanjutnya penyusunan rencana tata ruang mempertimbangkan aspek dari Lingkungan untuk menyelamatkan dari bencana yang sesuai dengan karakteristiknya. Selain itu juga, rencana penataan ruang memberikan muatan tentang pembangunan fisik untuk pengendalian bencana.
6. Integritas Pemerintah di dalam mengatasi bencana berskala Nasional, Provinsi, Maupun Kabupaten/Kota. Integritas mengandung makna keseriusan dalam pengelolaan derah rawan bencana, pengelolaan penataan ruang pada daerah lindung secara cepat dan tepat sehingga tidak menimbulkan dampak negative yang berlebihan.
7. Keterlibatan stekholder dalam proses suatu perencanaan penataan ruang dengan membuat sebuah program atau kegiatan yang bertujuan untuk menanggulangi bencana dengan menyaring aspirasi-aspirasi dari beberapa pemangku kepentingan..

A. Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang adalah serangkaian kegiatan atau program yang dilaksanakan untuk pembangunan yang menggunakan pemanfaatan Ruang dalam kurun waktu tertentu yang sudah ditetapkan di dalam perencanaan penataan ruang. Pemanfaatan Ruang yang dimaksud adalah pembiayaan program atau kegiatan seperti mobilisasi, urgensi, dan alokasi pendanaan untuk melaksanakan pembangunan (Muta'ali, 2013)

B. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian Pemanfaatan Ruang ini merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk kawasan yang rawan dengan bencana. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui peraturan zonasi, perizinan, monitoring, evaluasi, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (PASDAPR) Kabupaten Brebes dalam penanggulangan bencana banjir dengan menggunakan pembangunan fisik maupun non fisik yang sudah tertera di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes tahun 2010-2030 pada pasal 48 menjelaskan bahwa pelestarian dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan cara Perbaikan Tanggul, Bendung, Saluran Pembuangan, Kawasan Resapan, dan Penyuluhan.

1.6. Definisi Konseptual

Secara konsep istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian, kelompok, individu secara keseluruhan. melalui konsep kemudian peneliti diharapkan dapat disederhanakan pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. oleh karena itu konsep yang telah di dapatkan adalah :

1. Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan sesuatu hal yang penting karena sebagai tolak ukur keberhasilan di dalam instansi pemerintahan. di dalam penilaian Kinerja komponennya meliputi sebagai pelayan publik, jadi informasi mengenai seberapa jauh pemerintah melakukan pelayanan kepada masyarakat di Daerah-Daerah Indonesia. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (PSDAPR) Kabupaten Brebes dengan menggunakan indikator menurut

(Sudarmanto, 2014) meliputi Produktifitas, Kualitas Pelayanan, Responsitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Akan tetapi indikator yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga indikator yaitu Produktifitas, Responsitas, dan Akuntabilitas karena ketiga indikator tersebut sudah mewakili indikator yang lainnya, Karena kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat sudah tertuang di dalam ketiga indikator tersebut. (Hayati, 2012)

2. Mitigasi Bencana

Serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi bencana melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (PSDAPR) Kabupaten Brebes dalam Mitigasi Bencana tahun 2017-2018 Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes tahun 2010-2030 pada pasal 48 dengan cara Pembuatan Tanggul, Bendungan, Embung, Saluran Pembuangan Khusus, Kawasan Resapan, dan Penyuluhan.

1.7. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah unsur penelitian tentang memberikan informasi bagaimana cara untuk mengukur variable dengan kata lain petunjuk dan pelaksana untuk mengukur variabel Kinerja yang digunakan meliputi Produktifitas mempunyai dua indikator yaitu Efisien (Biaya dalam program maupun kegiatan sesuai dengan tujuan) dan Efektif (Waktu dalam program maupun kegiatan sesuai dengan tujuan), kemudian Responsitas merupakan kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, penyusunan agenda, dan prioritas pelayanan, sedangkan Akuntabilitas merupakan bentuk sesuatu pertanggungjawaban

kepada publik dengan transparansi melewati media sosial, Webset, dll. Kemudian Mitigasi dalam Penataan Ruang dijadikan satu dengan parameter meliputi Pembuatan Tanggul, Bendungan, Embung, Saluran Pembuangan Khusus (Saluran Pembuangan Air Limbah), Kawasan Resapan (Sumur Resapan Bangunan), dan Penyuluhan (Bahaya pengalihan fungsi lindung untuk kegiatan budidaya, Bangunan yang ada di sepanjang sempadan irigasi tidak memiliki kaitan dalam pengelolaan irigasi dilarang untuk didirikan).

Dari penjelasan diatas, maka indikator-indikator yang digunakan meliputi Kinerja dan adalah sebagai berikut :

No	Variabel	Indikator	Parameter dalam mitigasi bencana
1.	Produktifitas	Efisien	Biaya <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Tanggul 2. Bendungan 3. Embung 4. Saluran Pembuangan Khusus (Saluran Pembuangan Air Limbah) 5. Kawasan Resapan (Sumur Resapan Bangunan) 6. Penyuluhan

			<p>(Bahaya pengalihan fungsi lindung untuk kegiatan budidaya, Bangunan yang ada di sepanjang sempadan irigasi tidak memiliki kaitan dalam pengelolaan irigasi dilarang untuk didirikan)</p>
		<p>Efektif</p>	<p>Waktu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Tanggul 2. Embung 3. Bendungan 4. Saluran Pembuangan Khusus (Saluran Pembuangan Air Limbah) 5. Kawasan Resapan (Sumur Resapan Bangunan) 6. Penyuluhan <p>(Bahaya pengalihan fungsi lindung untuk kegiatan budidaya, Bangunan yang ada di sepanjang sempadan irigasi tidak memiliki kaitan dalam</p>

			<p>pengelolaan irigasi dilarang untuk didirikan)</p>
3.	Responsitas	Organisasi	<p>Menyusun Agenda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Musrembang 2. FGD (Forum Group Discussion)
			<p>Kebutuhan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Tanggul 2. Bendungan 3. Embung 4. Saluran Pembuangan Khusus (Saluran Pembuangan Air Limbah) 5. Kawasan Resapan (Sumur Resapan Bangunan) 6. Penyuluhan (Bahaya pengalihan fungsi lindung untuk kegiatan budidaya, Bangunan yang ada di sepanjang sempadan irigasi tidak memiliki kaitan dalam

			<p>pengelolaan irigasi dilarang untuk didirikan)</p> <p>Prioritas Pelayanan</p> <p>Pembangunan Tanggul (Faktor utama penyebab terjadinya bencana banjir)</p>
5.	Akuntabilitas	Pertanggung Jawaban	<p>Transparansi</p> <p>(Keterbukaan dalam memberikan informasi Publik tentang Program maupun Kegiatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Tanggul 2. Bendungan 3. Embung 4. Saluran Pembuangan Khusus (Saluran Pembuangan Air Limbah) 5. Kawasan Resapan (Sumur Resapan Bangunan) 6. Penyuluhan

			(Bahaya pengalihan fungsi lindung untuk kegiatan budidaya, Bangunan yang ada di sepanjang sempadan irigasi tidak memiliki kaitan dalam pengelolaan irigasi dilarang untuk didirikan)
--	--	--	--

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pengertian kualitatif adalah yaitu menjelaskan pembahasan suatu objek yang diteliti dengan menggunakan wawancara sehingga akan banyak informasi yang di jelaskan secara analisis secara empirik. Menurut (Strauss & Corbin , 2003) Penelitian Kualitatif merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mencari data dengan menggunakan sarana dan prasarana meliputi Analisis maupun wawancara, akan tetapi bisa juga mencakup tentang Dokumen, Buku, Kaset Vidio, ataupun data yang merujuk kepada tujuan lain seperti data sensus, dan lain-lain. Dalam penelitian ini akan bermaksud untuk mendapatkan informasi atau fakta-fakta mengenai Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (PSDAPR) Kabupaten Brebes dalam Mitigasi Bencana tahun 2017-2018.

1.8.2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini terletak di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Khususnya di Dinas terkait yaitu Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (PSDAPR) Kabupaten Brebes dalam Mitigasi Bencana tahun 2017-2018.

1.8.3. Unit Analisa Data

Unit analisa data adalah suatu kesatuan yang diteliti yang berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti aktifitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Dalam penelitian ini fokus yang akan diteliti sebagai narasumber sebagai subjek menggunakan metode *Purposive Sampling*, menurut (Arikunto, 2010) Metode ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang diteliti dengan menggunakan narasumber yang mengetahui tentang permasalahan-permasalahan yang akan dibahas serta mampu mengembangkan informasi data. Penelitian menggunakan subjek penelitian sebagai berikut :

No	Narasumber	Jumlah
1.	Kepala Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Brebes	1
2.	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (PSDAPR) Kabupaten Brebes	1

3.	Kasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air Dinas PSDAPR Kabupaten Brebes	1
4.	Kepala Seksi/Staff Eksploitasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Air Baku Dinas PSDAPR Kabupaten Brebes	1
5.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Brebes	1

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan Wawancara dan Dokumentasi

a. Wawancara

Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara yaitu dengan Pembicaraan Informal yang bertujuan untuk mendapatkan pandangan tentang subyek yang diteliti tentang berbagai macam hal yang akan bermanfaat untuk menjadi dasar penelitian, selain itu juga bisa wawancara secara mendalam untuk mendapatkan informasi secara mendalam yang berkaitan dengan penelitian.

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan responden secara terstruktur kepada Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Brebes, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (PSDAPR), Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku Dinas PSDAPR Kabupaten Brebes, Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Irigasi dan Air Baku Dinas PSDAPR Kabupaten Brebes, Kepala Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan Irigasi

dan Air Baku Dinas PSDAPR Kabupaten Brebes, Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Brebes

No	Nama Instansi	Jabatan	Nama Lengkap
1.	Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Brebes	Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi	Heru Prasetyo, ST
2	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (PSDAPR) Kabupaten Brebes	Kasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air	Moh. Khumaedi, ST
		Kasi Eksploitasi, Pemeliharaan Irigasi, dan Air Baku	Mahyudi Hidayat, ST
3.	Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Brebes	Kasi Kesiapsiagaan	Abdul Farid

b. Dokumentasi

Tekhnik ini Digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara dokumen-dokumen yang ada di lapangan di dokumentasikan dan publikasi serta sumber-sumber yang relevan yang berkaitan dengan objek atau subjek yang diteliti.

1.8.4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapatkan secara langsung dari suatu narasumber yang dijadikan sebagai objek penelitian. Data Primer juga digunakan menggunakan tekhnik wawancara kepada Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Brebes, Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (PSDAPR), Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku Dinas PSDAPR Kabupaten Brebes, Kepala Seksi/Staff Pembangunan dan Peningkatan Irigasi dan Air Baku Dinas PSDAPR Kabupaten Brebes, Kepala Seksi/Staff Eksploitasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Air Baku Dinas PSDAPR Kabupaten Brebes, Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Brebes.

b. Data Sekunder

Data Sekuler adalah antonim dari pengertian data primer,yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat suatu keadaan konsep penelitian di dalam objek yang akan di jadikan penelitian.data sekunder menggunakan tehnik pengumpulan data dokumentasi meliputi :

No	Sumber Data Penelitian
1.	Rencana Pempangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3.	Rencana Strategis Pembangunan (RENSTRA)
4.	Rencana Kerja (RENJA)
5.	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

6.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD)
7.	Surat Perintah Kerja (SPK)

1.8.5. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi akan di analisa dengan menggunakan model interaktif. Menurut miles dan Huberman dalam (Idrus, 2009) model interaktif merupakan serangkaian kegiatan sebelumnya, selama, dan sesudah pengumpulan data yang terdiri dari tiga pokok utama yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah memilih dan menseleksi data yang sudah di dapatkan di lapangan yang sesuai dengan kebutuhan yang bertujuan untuk mendukung argumentasi yang akan dibangun.

b. Penyajian Data

Penyajian data yang berhubungan dengan berbagai bentuk data yang di dapatkan yang berbentuk tabel, matriks, bagan, dan lain-lain. Penelitian ini akan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang Kabupaten Brebes dalam mitigasi bencana banjir tahun 2017-2018.

c. Verifikasi dan Pengambilan Kesimpulan

Tahapan ini merupakan proses terakhir di dalam penelitian dengan data yang diperoleh yang berbentuk soft copy maupun hard copy terutama dokumen Dinas PSDAPR. Selain itu hasil wawancara setelah melalui proses reduksi akan

disajikan dan diperiksa kembali, karena akan berkaitan dengan interpretasi data dan pengambilan kesimpulan. Jika kesimpulan tersebut di dukung dengan data yang akurat maka akan terbentuk argument-argumen yang kuat.